

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah menggambarkan kondisi dan analisis statistik Perekonomian Daerah, sebagai gambaran umum untuk situasi perekonomian DKI Jakarta tahun 2008 berikut karakteristiknya serta prospek perekonomian tahun 2009-2010. Bab ini juga membahas mengenai tantangan perekonomian Jakarta serta gambaran dinamika faktor eksternal dan internal yang diperkirakan mempengaruhi kinerja perekonomian daerah.

A. Kondisi Ekonomi Makro Provinsi DKI Jakarta

Kondisi ekonomi makro tahun 2008 dan perkiraannya tahun 2009 dapat disimpulkan sebagai berikut.

Pertama, ekonomi tahun 2008 relatif terjaga baik, meskipun pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan dan laju inflasi melampaui dua digit, masih menunjukkan kondisi yang positif. Laju inflasi tahun 2008 mencapai sebesar 11,11 persen dari 6,04 persen pada tahun 2007, kenaikan BBM pada bulan Mei memicu inflasi menjadi dua digit. Sementara laju pertumbuhan ekonomi melambat menjadi sebesar 6,18 persen dari 6,44 persen pada tahun 2007.

Kedua, terjaganya stabilitas ekonomi yang didukung oleh permintaan eksternal yang kuat menahan pertumbuhan ekonomi yang mulai melambat. Penerimaan ekspor produk DKI Jakarta dalam tahun 2008 meningkat menjadi USD 9,42 miliar dari USD 8,06 miliar atau naik 16,88 persen. Sementara ekspor yang melalui wilayah Jakarta pada tahun 2008 meningkat menjadi USD 35,89 miliar dari 31,97 miliar atau meningkat 12,28 persen. Kepercayaan luar negeri juga tergambar dengan naiknya jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke Jakarta melalui tiga pintu masuk utama. Wisman yang datang ke Jakarta pada tahun 2008 sebanyak 1,53 juta orang dari 1,22 juta pada tahun 2007.

Ketiga, kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja meningkat. Dalam bulan Agustus 2007 – Agustus 2008, tercipta lapangan kerja baru bagi 349 ribu orang sehingga pengangguran terbuka menurun 12,57 persen menjadi 12,16 persen.

Gambaran lebih rinci kondisi ekonomi tahun 2008 dan perkiraan tahun 2009 adalah sebagai berikut.

PERTUMBUHAN EKONOMI. Langkah-langkah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mampu menjaga kembali momentumnya. Perekonomian Jakarta tahun 2008 tumbuh 6,18 persen, lebih tinggi dibanding pertumbuhan nasional yang sebesar 6,06 persen.

Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 terutama didorong oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) serta pengeluaran pemerintah yang masing-masing tumbuh sebesar 8,49 persen dan 6,75 persen. Sementara itu konsumsi rumah tangga, meningkat sebesar 6,67 persen serta ekspor barang dan jasa tumbuh sebesar 2,18 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh sektor pengangkutan dan komunikasi yang tumbuh sebesar 14,97 persen; sektor konstruksi; sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa yang masing-masing tumbuh sebesar 7,67 persen; 6,25 persen, dan 6,05 persen. Adapun sektor industri pengolahan dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yang merupakan sektor utama Jakarta hanya tumbuh sebesar 3,87 persen dan 4,31 persen.

Tekanan krisis keuangan global akan mempengaruhi kinerja perekonomian Jakarta. Namun dengan ditingkatkannya koordinasi dan efektivitas kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil terutama dalam mengatur permintaan agregat, perekonomian dalam tahun 2009 diperkirakan masih mampu tumbuh positif meskipun dibawah 5 persen dan ini lebih lambat dari perkiraan semula yang sebesar 6 persen. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumahtangga dan konsumsi pemerintah didorong sebagai penggerak perekonomian. Sedangkan dari sisi produksi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan didorong tumbuh tinggi.

INFLASI. Kenaikan BBM pada bulan Mei 2008 yang sebesar 28 persen tercermin dari angka inflasi yang relatif tinggi dari 6,04 persen pada tahun 2007 menjadi 11,11 persen. Sampai dengan bulan Maret tahun 2009 Jakarta mengalami deflasi sebesar -0.13 persen, dengan tetap menjaga distribusi kebutuhan pokok Jakarta, inflasi Jakarta tahun 2009 diperkirakan mencapai hanya sebesar 6,5 persen.

PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN. Momentum pertumbuhan ekonomi yang kembali terjaga pada tahun 2008 telah menciptakan lapangan kerja yang cukup besar dan sekaligus menurunkan pengangguran terbuka. Dalam bulan Agustus 2007 – Agustus 2008, telah tercipta lapangan kerja baru bagi 349 ribu orang sehingga pengangguran terbuka menurun dari 12,57 persen menjadi 12,16 persen

Jumlah penduduk miskin yang masih berjumlah 405,7 ribu jiwa (Maret 2007) menjadi 379,6 ribu pada bulan Maret tahun 2008 atau menurun sekitar 26,1 persen. Kenaikan harga BBM hampir dipastikan akan mempengaruhi jumlah penduduk miskin. Dengan upaya yang telah dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah seperti BLT dan PPMK diharapkan menekan kenaikan jumlah penduduk miskin.

PERDAGANGAN LUAR NEGERI. Pada tahun 2008 nilai ekspor yang melalui DKI Jakarta meningkat sebesar 12,29 persen dari nilai tahun sebelumnya atau mencapai 35,89 miliar Dollar Amerika. Hal ini disebabkan karena situasi perekonomian dunia yang relatif kondusif di awal tahun, relatif terkendalinya nilai tukar rupiah, serta membaiknya kondisi fiskal dan moneter di dalam negeri menjadi faktor penting yang mendorong meningkatnya perdagangan luar negeri khususnya berkaitan dengan nilai ekspor DKI Jakarta. Sedangkan untuk tahun 2009, pada triwulan I ekspor melalui Jakarta mencapai 7,66 miliar Dollar Amerika atau turun sebesar 11,76 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2008. Ekspor tahun 2009 secara total diperkirakan akan mengalami penurunan, krisis ekonomi global menjadi penyebab menurunnya permintaan luar negeri.

Nilai impor DKI Jakarta tercatat sebesar 53,53 miliar Dollar Amerika pada tahun 2008. Nilai tersebut meningkat sebesar 54 persen bila

dibandingkan dengan tahun 2007. Pada tahun 2009, nilai impor DKI Jakarta triwulan I sebesar 9,67 miliar Dollar Amerika atau turun sebesar 33,56 persen sehingga secara total tahun 2009 juga diperkirakan mengalami penurunan. Kebijakan pemerintah untuk membatasi impor untuk menjaga produksi domestik akan membawa dampak nilai impor DKI Jakarta pada tahun 2009 mengalami penurunan.

Jakarta tampaknya semakin atraktif bagi wisatawan mancanegara yang ditandai dengan meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara. Pada tahun 2008 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,53 juta orang. Untuk tahun 2009, sampai dengan triwulan I jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Jakarta mencapai 328,55 ribu orang atau turun sebesar 6,84 persen dibandingkan tahun 2008. Namun demikian tahun 2009 diharapkan jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Jakarta meningkat menjadi 1,63 juta orang.

KEMAMPUAN DAERAH DALAM MEMBIAYAI INVESTASI. Besaran nilai investasi merupakan salah satu faktor penting yang menentukan dinamika perekonomian daerah. Di samping untuk mendorong perekonomian daerah, peningkatan investasi juga diharapkan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja. Pada tahun 2008, investasi di DKI Jakarta yang dihitung dengan menggunakan komponen pembentukan modal atas dasar harga konstan tahun 2000 menunjukkan besaran nilai sekitar Rp.122,16 triliun. Bila dihitung dengan menggunakan harga berlaku nilainya mencapai Rp.240,97 triliun.

Kebutuhan investasi tersebut dibiayai oleh pemerintah pusat, daerah dan masyarakat. Pada tahun 2008 peranan investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 3,5 persen dan pada tahun 2008 diperkirakan turun menjadi 3,2 persen terhadap total investasi yang dibutuhkan. Hal ini menunjukkan kemampuan keuangan daerah mengalami sedikit penurunan dalam peranannya menyumbang investasi. Sedangkan investasi swasta banyak memberikan perhatian kepada bidang jasa pengangkutan, pergudangan, komunikasi, konstruksi, hotel dan restoran, serta jasa lainnya.

Selain itu, pada waktu-waktu mendatang perlu dilakukan pula perbaikan dan penyempurnaan terhadap faktor-faktor yang dapat memacu arus investasi swasta ke Jakarta, diantaranya dengan meningkatkan penyediaan infrastruktur, menyehatkan iklim ketenagakerjaan, dan kepastian hukum serta senantiasa melakukan upaya peningkatan pelayanan perijinan.

PENDAPATAN DAERAH. Pada tahun 2008 rasio PAD terhadap PDRB sebesar 1,54 persen, pada tahun 2008 diperkirakan akan mengalami penurunan menjadi 1,53 persen. Penurunan ini menunjukkan bahwa PAD yang dihasilkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih kurang optimal.

Kondisi perekonomian tahun 2008 yang relatif baik dapat mempengaruhi pendapatan daerah yang relatif tinggi peningkatannya. Secara total pendapatan tahun 2008 meningkat sebesar Rp. 2,1 triliun atau naik sebesar 12,5 persen dari realisasi. Peningkatan terbesar diperoleh dari kenaikan pendapatan yang berasal dari dana berimbangan sebesar Rp. 1,45 triliun atau naik sebesar 19,97 persen. Sedangkan pendapatan asli daerah meningkat sebesar Rp.1,3 triliun atau meningkat 14,3 persen.

Komponen-komponen pendapatan asli daerah dapat melampaui pendapatan tahun 2007 kecuali komponen laba usaha daerah. Sementara komponen dana perimbangan seluruhnya dapat melampaui Tabel 3.1. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2007 – 2008.

Tabel 3.1 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2007 dan 2008

JENIS PENDAPATAN	2007	2008
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	8.733,02	10.455,57
Pajak Daerah	7.202,52	8.751,72
Retribusi	676,00	395,63
Hasil Pengelolaan daerah yg dipisahkan	144,04	160,77
Lain – lain PAD yang sah	710,44	1.147,38
DANA PERIMBANGAN	7.254,01	8.702,81
Dana Bagi Hasil Pajak	7.005,17	8.526,79
Dana bagi Hasil Bukan Pajak	128,89	176,01
DAU	119,94	-
DAK	-	-
LAIN – LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	683,92	63,38
Hibah	-	-
Bantuan Keuangan	683,05	63,38
TOTAL PENDAPATAN	16.670,96	19.221,76

Arah kebijakan belanja daerah pada tahun 2008 tetap ditekankan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan upaya memenuhi kebutuhan dasar sarana dan prasarana pelayanan. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan diupayakan agar pelayanan bergeser dan menjadi lebih dekat kepada masyarakat. Untuk itu, peningkatan alokasi anggaran pada jajaran pemerintahan dari tingkat Kotamadya/Kabupaten ke bawah terus menjadi perhatian seiring dengan pendelegasian kewenangan pada SKPD dimaksud.

Sumber penerimaan utama pembiayaan tahun 2008 berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu berupa sisa penyerapan belanja tahun 2007 sebesar Rp. 1,4 triliun dan tidak menggunakan Dana Cadangan Daerah (DCD). Sedangkan untuk komponen pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo sebesar Rp. 49,8 miliar dan penyertaan modal pemerintah sebesar Rp. 133,3 miliar. Sehingga total APBD tahun 2008 sebesar Rp. 20,59 triliun.

B. Tantangan Pokok

Di tahun mendatang, diduga pembangunan ekonomi Jakarta masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Beragam tantangan dimaksud perlu disikapi secara arif dan komprehensif serta dengan langkah-langkah yang lebih nyata. Tantangan dimaksud antara lain mencakup:

1. Persoalan pemantapan kinerja dan stabilitas ekonomi makro sebagai prasyarat bagi kesinambungan pembangunan ekonomi. Upaya yang sungguh-sungguh untuk menjaga dan memantapkan stabilitas ekonomi makro merupakan keharusan, mengingat masih adanya potensi gejolak eksternal terkait dengan tingginya harga minyak dunia dan ketidakseimbangan global (*global imbalances*) pada aliran likuiditas jangka pendek. Hal tersebut akan mempengaruhi stabilitas moneter dan ketahanan fiskal dalam negeri.

Pemerintah, dalam rangka menjaga dan memantapkan kinerja ekonomi makro, terus berupaya untuk mengatasi dampak gejala ekonomi domestik dan global, seperti laju inflasi dan suku bunga yang masih relatif tinggi. Upaya ini perlu didukung oleh langkah kongkrit dan sungguh-sungguh dalam memperkuat koordinasi dan efektifitas kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil di dalam negeri.

2. Percepatan pertumbuhan ekonomi akan terus dipacu dengan mengembangkan pertumbuhan yang lebih berimbang, yang bertumpu pada peran investasi dan ekspor non migas. Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro, dan dengan pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan prioritas pengembangan pada sektor-sektor yang mempunyai efek pengganda tinggi dalam menciptakan kesempatan kerja.
3. Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Ini adalah tantangan cukup besar bagi pemerintah dewasa ini. Komitmen perbaikan iklim investasi tersebut telah dilakukan pemerintah dengan mengadakan perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan, pelayanan, dan penyederhanaan prosedur termasuk penyederhanaan birokrasi.
4. Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi.
5. Meningkatkan daya saing ekspor, untuk mencapai peningkatan pertumbuhan ekspor yang tinggi. Tingginya pertumbuhan ekspor diperlukan tidak saja sebagai penopang pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan juga untuk merangsang penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan bermutu.

6. Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (*public-private partnership*). Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas.
7. Membangun landasan yang kokoh bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masa-masa yang akan datang.

Oleh karena itu, tantangan tersebut harus dapat diatasi secara tepat dan proporsional melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. Perlunya meningkatkan pertumbuhan dan sekaligus pemerataan hasil pembangunan ekonomi.
2. Perlunya memantapkan kembali kinerja perekonomian dan pemberdayaan masyarakat, walaupun perekonomian Jakarta telah menunjukkan hasil yang cukup baik, pertumbuhan dan perkembangan perekonomian yang telah berhasil dicapai, agar terus diikuti dengan upaya pemberdayaan masyarakat secara lebih memadai.
3. Perlunya meningkatkan pemberdayaan kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan perekonomian Jakarta, dan mampu memperbesar daya serapnya terhadap tenaga kerja.
4. Perlunya menciptakan iklim kondusif bagi perekonomian daerah, sebagai salah satu prasyarat terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan (terpercaya, memiliki kemudahan, dan efisien).
5. Perlunya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, dalam upaya menjaga kelancaran kegiatan ekonomi, transaksi bisnis, dan investasi.
6. Perlunya menyediakan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah termasuk di dalamnya adalah peningkatan efisiensi distribusi barang dan jasa. Infrastruktur jalan raya perlu ditingkatkan baik volume maupun kualitasnya.

C. Prospek Ekonomi Tahun 2010-2011

Fokus kebijakan ekonomi makro DKI Jakarta tahun 2010-2011 adalah pemantapan pertumbuhan ekonomi dengan tujuan utama menciptakan kesempatan kerja, mengurangi penduduk miskin, meningkatkan mutu pelayanan publik dan mengelola migrasi masuk.

Adanya situasi keterbatasan keuangan negara dalam pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dituntut mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Berkaitan dengan kondisi yang digambarkan di atas maka usaha-usaha yang harus dilakukan dalam pemantapan ekonomi daerah yaitu: **Pertama**, menciptakan ketenteraman stabilitas ekonomi tahun 2010 terjaga baik dan ketertiban sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh daerah. **Kedua**, menyederhanakan prosedur perijinan usaha. **Ketiga**, menyediakan infrastruktur kota untuk menunjang pertumbuhan dan distribusi ekonomi daerah. **Keempat**, menyempurnakan sistem pengupahan guna peningkatan produktivitas tenaga kerja, **Kelima**, pemberdayaan UMKM dan masyarakat miskin dengan meningkatkan koordinasi berbagai institusi melalui jaringan sistem keuangan mikro. **Keenam**, memperbaiki modal sosial khususnya etos kerja dalam rangka peningkatan produktivitas kerja. **Ketujuh**, efisiensi alokasi sumber daya dan dana dalam perekonomian daerah.

Berdasarkan kondisi riil perekonomian Jakarta tahun 2008 dan perkiraan 2009, maka prospek perekonomian tahun 2010-2011 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi tahun 2010 diperkirakan akan mengalami perbaikan setelah pada tahun 2009 mengalami perlambatan akibat krisis keuangan global, dengan pemerintahan yang baru terpilih perekonomian pada tahun 2010 perekonomian diharapkan dapat kembali tumbuh diatas 5 persen karena adanya dorongan permintaan (*demand driven*), dan tahun 2011 mampu tumbuh 6 persen;

2. Inflasi tahun 2009 diperkirakan sekitar 6,5 persen, dan pada tahun 2010 inflasi dapat kembali normal 6 persen dan turun pada tahun 2011 sebesar 5,9 persen.
3. Ekspor produk DKI Jakarta pada tahun 2009 diperkirakan melambat mencapai USD 9,66 miliar, tahun 2010 sebesar USD 10,57 miliar dan tahun 2011 sebesar USD11,64 miliar.
4. Jumlah wisman yang datang ke Jakarta pada tahun 2009 diperkirakan 1,63 juta orang, tahun 2010 mencapai 1,64 juta orang dan tahun 2011 mencapai 1,68 juta orang.
5. Dengan kondisi di atas, diharapkan jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2010 mencapai 3,90 juta orang dan pada akhir tahun 2011 mencapai 4,10 juta orang, sehingga tingkat pengangguran terbuka pada periode yang sama diharapkan dapat ditekan dibawah 10 persen;

Untuk mengetahui gambaran yang lebih detil mengenai kinerja ekonomi makro DKI Jakarta, kebutuhan investasi, kekuatan ekonomi sektoral, dan kecenderungan beberapa indikator sosial dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

**Tabel 3.2 Perkembangan Indikator Ekonomi Dan Sosial
Provinsi DKI Jakarta, Tahun 2007-2011**

No.	Indikator Makro	Kondisi Awal		Proyeksi		
		2007	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PDRB-Harga Berlaku (Triliun Rp.)	566,45	677,45	756,11	843,15	946,47
2	PDRB – Harga Konstan 2000 (Triliun Rp.)	332,97	353,54	370,51	389,78	413,16
3	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,44	6,2	4 - 5	5	6,0
4	Tingkat Inflasi (%)	6,04	11,11	6,50	6,00	5,90
5	Struktur Ekonomi Menurut Sektoral (%)					
	a. Pertanian	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09
	b. Pertambangan	0,47	0,48	0,35	0,31	0,28
	c. Industri Pengolahan	15,97	15,73	15,21	15,06	14,88
	d. Listrik, Gas & Air Bersih	1,06	1,12	1,01	1,00	0,99
	e. Konstruksi	11,20	11,29	11,19	11,36	11,58
	f. Perdagangan, Hotel & Restoran	20,36	20,68	20,53	20,61	20,67
	g. Pengangkutan & Komunikasi	9,32	9,36	11,86	12,34	12,81
	h. Keuangan, Persewaan & Jasa	28,65	28,56	26,98	26,51	26,05

No.	Indikator Makro	Kondisi Awal		Proyeksi		
		2007	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Perusahaan					
	i. Jasa-jasa	12,87	12,69	12,77	12,72	12,66
6	Produktivitas Sektoral (Juta Rp)					
	a. Pertanian	22,47	23,53	25,98	27,80	30,34
	b. Pertambangan	644,36	587,51	578,35	567,18	568,54
	c. Industri Pengolahan	154,50	158,50	175,02	191,63	213,33
	d. Listrik, Gas & Air Bersih	544,53	560,93	614,30	672,59	750,28
	e. Konstruksi	397,89	419,88	472,58	530,51	609,51
	f. Perdagangan, Hotel & Restoran	83,20	89,43	99,80	110,77	125,21
	g. Pengangkutan & Komunikasi	164,68	215,94	249,13	286,65	335,57
	h. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	738,69	757,37	827,32	898,94	995,35
	i. Jasa-jasa	87,73	93,59	103,52	113,99	127,84
7	Struktur Ekonomi Menurut Pengeluaran (%)					
	a. Konsumsi Rumah Tangga	55,97	55,63	56,45	56,65	56,08
	b. Konsumsi Pemerintah	5,89	7,07	5,81	5,89	5,92
	c. Pembentukan Modal Tetap Bruto	37,58	35,79	36,96	37,10	37,24
	d. Ekspor	56,67	54,41	56,97	56,83	56,42
	e. Impor	53,90	55,11	53,31	55,69	54,08
8	ICOR	4,4	5,2	5,3	5,4	4,8
9	Jumlah Wisman (Juta Orang)	1,22	1,53	1,63	1,64	1,68
10	Ekspor (Juta \$)					
	a. Melalui pelabuhan muat DKI Jakarta	31.966,58	35.893,93	37.191,19	40.474,54	44.297,88
	b. Produk/asal DKI Jakarta	8.059,57	9.419,98	9.660,91	10.573,51	11.642,23
11	Impor melalui pelabuhan muat DKI Jakarta (Juta \$)	34.739,27	53.531,90	59.423,70	65.315,50	84.962,71
	a. Barang Konsumsi	3.532,35	3.725,12	4.135,12	4.545,11	5.912,30
	b. Bhn Baku & Penolong	21.910,20	36.832,32	40.886,14	44.939,95	58.458,10
	c. Barang Modal	9.296,72	12.974,46	14.402,45	15.830,44	20.592,31
12	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Orang)	405,70	379,60	402,70	401,22	399,74
13	Persentase Jumlah Penduduk Miskin (%)	4,5	4,3	4,5	4,47	4,44
14	Jumlah Angkatan Kerja (Juta Orang)	4,40	4,77	4,30	4,40	4,60
15	Jumlah Penduduk Bekerja (Juta Orang)	3,84	4,19	3,80	3,90	4,10
16	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	12,57	12,16	12,10	11,50	10,90
17	PDRB Per Kapita					
	- Dalam Jutaan Rupiah	62,49	74,03	81,81	90,33	100,39
	- Dalam US\$	6.917	7.756	7.792	8.943	9.940

No.	Indikator Makro	Kondisi Awal		Proyeksi		
		2007	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18	Kemampuan Investasi Pemda DKI Jakarta (Triliun Rp)	7,9	8,5	9,1	9,3	10,7
19	Peranan Investasi Pemda DKI Jakarta Terhadap Investasi Total (%)	3,8	3,5	3,2	3,0	3,0
20	Jumlah Penduduk (Juta Orang)	9,06	9,15	9,24	9,33	9,43
	a. Kepadatan Penduduk (penduduk/km)	13.634,0	13.785,0	13.937,0	14.090,0	14.245,0
	b. Komposisi Penduduk (%)					
	0 – 14	24,23	23,80	23,30	22,80	22,70
	15 – 64	72,32	72,88	73,24	73,60	73,48
	65 +	3,45	3,32	3,46	3,60	3,82
21	Indek Pembangunan Manusia	76,4	76,5	76,6	76,7	76,8
22	Angka Kelahiran Total (TFR) per Wanita	1,52	1,52	1,51	1,51	1,51
23	Angka Kematian Bayi (IMR)	13,20	12,70	12,20	11,70	11,36
24	Angka Harapan Hidup (e_0)	74,28	74,42	74,56	74,70	74,84
25	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	11,16	11,56	11,77	12,01	12,25
26	Angka Melek Huruf (%)	98,83	98,68	98,84	99,01	99,18
27	Angka Partisipasi Sekolah (%)					
	a. 7 - 12 Tahun	98,73	98,83	98,93	99,03	99,13
	b. 13 - 15 Tahun	90,36	90,75	91,04	91,34	91,63
	c. 16 - 18 Tahun	61,05	63,54	65,17	66,81	68,45
28	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	1,27	1,26	1,25	1,24	1,23
29	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap PDRB	1,62	1,54	1,53	1,53	1,52
30	Rasio Dana Perimbangan terhadap PDRB	1,28	1,26	1,26	1,20	1,26
31	APBD (Triliun Rp)	17,09	20,59	20,98	23,16	26,85

D. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

1. Asumsi Dasar

Perekonomian tahun 2010 yang diperkirakan akan lebih baik dari kondisi tahun 2009 berimplikasi juga terhadap perkiraan pendapatan tahun

2010. Asumsi dasar yang digunakan untuk memperkirakan pendapatan tahun 2010 dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 3.3 Asumsi Dasar DKI Jakarta Tahun 2008-2010

Variabel	APBD 2008	APBD2009	RAPBD 2010
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertumbuhan Ekonomi	6,2	3,25 - 4,25	4,25 - 5,25
Inflasi	11,5	6,0	5,5
Nilai Tukar (Rupiah/1 dollar AS)	9.100	11.000	9.500-10.500
Harga Minyak (dollar AS/barrel)	83	45	45 - 60

2. Kebijakan dan Rencana Pendapatan Daerah

Arah kebijakan pokok pendapatan daerah tahun 2010 dilakukan dengan memperbaiki kebijakan perpajakan di tahun 2009. Kebijakan ini selain ditujukan untuk meningkatkan penerimaan daerah juga akan diarahkan untuk memberikan stimulus secara terbatas guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Sehubungan dengan kebijakan tersebut akan dilakukan langkah-langkah berkaitan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah serta pengelolaan BUMD yang efisien dan efektif sebagai berikut:

1. Optimalisasi Pajak Daerah melalui Online Sistem Pajak Hotel dan Restoran;
2. Menaikan tarif parkir *off street* dengan sistem *zona*;
3. Meningkatkan kemampuan manajemen Pengelolaan bisnis BUMD;
4. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk memperoleh insentif DAU;
5. Koordinasi untuk pencairan Hibah MRT yang telah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH);
6. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah.

Pendapatan daerah pada tahun 2010 diperkirakan mencapai Rp 21,77 triliun atau meningkat sebesar 5,31 persen dari angka penetapan tahun 2009 (sebesar Rp 20,67 triliun).

Total pendapatan sebesar 21,77 triliun terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp. 11,64 triliun, dana perimbangan sebesar Rp. 10,08 triliun dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 41 miliar. Pendapatan asli daerah yang merupakan komponen terbesar pendapatan daerah, pada tahun 2010 mengalami kenaikan terendah. Sumber PAD terbesar diperoleh dari pajak daerah yaitu Rp. 9,67 triliun atau naik 2,9 persen dari penetapan tahun 2009. Sedangkan komponen lainnya diperkirakan mengalami kenaikan tidak berbeda dengan tahun lalu yaitu masing-masing retribusi daerah Rp. 436,82 miliar, laba usaha daerah Rp. 212,84 miliar dan lain-lain PAD yang sah Rp. 1,32 triliun.

Sumber terbesar komponen dana perimbangan adalah bagi hasil pajak yang diperkirakan pada tahun 2010 mencapai Rp. 9,86 triliun atau naik 6,09 persen dari angka penetapan 2009. Komponen ini terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan serta Pajak Penghasilan Pasal 21. Sebaliknya komponen bagi hasil bukan pajak dari Pemerintah Pusat justru diperkirakan menurun menjadi Rp. 219,78 miliar.

Tabel 3.4 Perkiraan Pendapatan Daerah Tahun 2009 - 2010

JENIS PENDAPATAN	2009	2010
	(2)	(3)
(1)		
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	11.134,54	11.644,97
Pajak Daerah	9.397,01	9.675,15
Retribusi	384,64	436,82
Hasil Pengelolaan daerah yg dipisahkan	180	212,84
Lain – lain PAD yang sah	1.172,89	1.320,16
DANA PERIMBANGAN	9.540,00	10.086,09
Dana Bagi Hasil Pajak	9.300,00	9.866,31
Dana bagi Hasil Bukan Pajak	240	219,78
DAU	-	-
DAK	-	-
LAIN – LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	41,00
Hibah	-	41,00

JENIS PENDAPATAN	2009	2010
(1)	(2)	(3)
Bantuan Keuangan	-	-
TOTAL PENDAPATAN	20.674,54	21.772,06

3. Kebijakan dan Rencana Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan kewajiban Pemerintah Daerah sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja yang bersangkutan.

Belanja daerah disusun dengan pendekatan kinerja yang ingin dicapai (*performance-based budgeting*). Belanja Daerah untuk membiayai antara lain:

- Belanja Pegawai yang meliputi gaji, tunjangan dan lain-lain.
- Belanja Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI).
- Belanja Dedicated Program yakni program yang berskala besar, monumental, dan berdampak luas pada kepentingan publik.
- Belanja Kegiatan Tahun Jamak (multi years) yakni kegiatan yang diselesaikan lebih dari setahun dan telah memperoleh persetujuan DPRD.
- Belanja Prioritas SKPD yakni untuk membiayai kegiatan sesuai tupoksi dan urusan pemerintahan.

Kebijakan belanja daerah pada tahun 2010 tetap ditekankan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan upaya memenuhi kebutuhan dasar sarana dan prasarana pelayanan. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan diupayakan agar pelayanan bergeser dan menjadi lebih dekat kepada masyarakat. Untuk itu, peningkatan alokasi anggaran pada jajaran pemerintahan dari tingkat Kotamadya/Kabupaten ke bawah terus menjadi perhatian seiring dengan pendelegasian kewenangan pada SKPD dimaksud. Arah kebijakan Belanja Daerah pada tahun 2010 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Belanja daerah disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD yang harus dicapai setiap tahunnya. (*performance-based budgeting*);
2. Mena ta sistem belanja pegawai:
 - o Tidak ada kenaikan gaji PNS
 - o Seluruh tunjangan yang bersifat lokal (TPP, Kesra, Tunjangan Khusus, dll) dihapuskan dan diganti dengan remunerasi (Tunjangan Daerah)
 - o Memberikan tunjangan khusus bagi aparat pelayanan lini terdepan (Kelurahan).
3. Menjalankan participatory program and budgeting untuk isu-isu yang dominan antara lain: pendidikan, kesehatan, dan transportasi, serta masalah banjir dan polusi:
 - o Anggaran urusan pendidikan dipertahankan lebih dari 20 persen APBD.
 - o Memenuhi alokasi anggaran untuk JPK Gakin.
4. Efisiensi belanja non fisik
 - o Meminimalkan belanja yang tidak langsung dirasakan pada masyarakat;
 - o Melakukan proper budgeting melalui analisis cost benefit dan tingkat efektivitas setiap program;
 - o Melakukan prudent spending melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya.
5. Meningkatkan proporsi alokasi belanja pada tingkat Kota/Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan
6. Mengakomodir usulan kegiatan dari hasil musrembang kelurahan samapai provinsi.
7. Memperjelas kerangka regulasi untuk setiap penetapan jenis belanja dan pagu alokasi dari setiap SKPD.

Total Belanja daerah pada tahun 2010 diperkirakan mencapai Rp 23,73 triliun atau meningkat sebesar 7,19 persen dari angka penetapan tahun 2009 (sebesar Rp 22,13 triliun).

Total belanja sebesar 23,73 triliun terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp.7,41 triliun; Belanja Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI) sebesar Rp.310,02 miliar; Belanja Wajib sebesar Rp1,19 triliun;

Belanja Dedicated Program sebesar Rp 7,50 triliun; Belanja Program Wilayah sebesar Rp 3,58 triliun dan Belanja Program SKPD sebesar Rp 3,72 triliun.

Tabel 3.5 Rencana Belanja Daerah Tahun 2009 - 2010

(dalam Milyar Rp.)

KOMPONEN	TAHUN	
	2009	2010
A. GAJI DAN TUNJANGAN	6.397,78	7.406,40
B. TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET (TALI)	301,60	310,02
C. WAJIB	1.186,80	1.198,78
D. DEDICATED PROGRAM	4.408,53	7.509,22
E. PAGU WILAYAH	3.440,42	3.580,82
1 Kota Administrasi Jakarta Pusat	560,51	570,51
2 Kota Administrasi Jakarta Utara	643,96	694,35
3 Kota Administrasi Jakarta Barat	746,39	751,39
4 Kota Administrasi Jakarta Selatan	705,41	710,41
5 Kota Administrasi Jakarta Timur	654,31	714,34
6 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	129,83	139,83
F. BELANJA SKPD	6.399,84	3.727,11
TOTAL BELANJA	22.139,47	23.732,36

Total Belanja Dedicated Program tahun 2010 direncanakan sebesar Rp.7,50 triliun. Adapun rincian rencana program/kegiatan dedicated dimaksud adalah sebagai berikut :

(dalam milyar Rp.)

NAMA PROGRAM/KEGIATAN DEDICATED	ANGGARAN	
	2009	2010
1 PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DAN TRANSPORTASI	564,20	2.036,37
a. Pembangunan Busway	117,00	298,30
1. Pembebasan Tanah untuk pelebaran jalan pada koridor Busway		25,00
2. Perbaikan jalan pada koridor Busway		60,00

NAMA PROGRAM/KEGIATAN DEDICATED		ANGGARAN	
		2009	2010
3.	Perbaikan/Perawatan prasarana pendukung koridor Busway (Jembatan Penyebrangan Orang, halte, separator, rambu, marka, traffic light, canopy, kebersihan halte/cleaning service, road study)		57,30
4.	Pengadaan Bus Untuk Koridor 9 dan 10		156,00
b.	Pembangunan MRT	51,50	160,00
1.	Pembebasan tanah untuk koridor MRT		50,00
2.	Pembebasan tanah untuk Depo MRT		25,00
3.	Dukungan provinsi untuk Pra-konstruksi MRT (trase, penyempurnaan geometrik jalan dan simpang, pedestrian, saluran, rambu, kajian feeder)		85,00
c.	Pengembangan Loop Line	0,00	190,00
1.	FO Tubagus Angke		95,00
2.	FO Bandengan		95,00
d.	Pembangunan terminal bus Pulogebang	30,00	316,47
1.	Pembangunan terminal bus Pulogebang Tahap I		316,47
e.	Pembangunan FO/UP dan Jalan Layang	12,00	529,60
1.	Pembangunan Interchange Sentra Primer Timur		110,00
2.	Pembangunan Jalan Layang Non-Tol Kampung Melayu - Tanah Abang (Segmen: Mas Mansyur - Dr. Satrio - Casablanca)		220,00
3.	Pembangunan Jalan Layang Non Tol Antasari-Blok M ruas Pasar Cipete-Wijaya I; 4,8 km (tahap I)	-	150,00
4.	Pembangunan Jembatan Kalibata	-	40,60
5.	DED Jalan Layang Non Tol Pasar Minggu – Manggarai		3,00
6.	DED Jalan Layang Non Tol Tendean – Cileduk		3,00
7.	DED Jalan Layang Non-Tol Kampung Melayu - Tanah Abang		3,00
8.	DED Jalan Layang Non Tol Antasari - Blok M (ditarik ke Perubahan 2009->Rp.3M)		
9.	Review UDGL Jln Layang Non Tol Kp. Melayu-Tnh Abang (ditarik ke Perubahan 2009->Rp.1M)		
f.	Peningkatan angkutan umum penyebrangan dari dan ke Kep. Seribu	93,00	132,00
1.	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Muara Angke (Lanjutan)		132,00
g.	Optimalisasi, perluasan dan penambahan jalan	260,70	410,00
1.	Pembebasan tanah untuk Jalan sejajar Tol W2		75,00
2.	Pembangunan Jalan Tembus / Missing Link		30,00
3.	Pemeliharaan Jalan Berkala 5 Wilayah Jakarta		305,00
2	PENGENDALIAN BANJIR	842,00	905,00
a.	Pembangunan BKT	750,00	486,00
1.	Pembebasan lahan BKT		486,00
b.	Normalisasi sungai dan saluran	87,00	92,00
1.	Penyelesaian Sistem Pompa Cideng		15,00
2.	Peningkatan kapasitas long storage Kali Siantar dan Kali Cideng		30,00
3.	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sistem Drainase untuk Menangani Genangan di Jalan Arteri dan Kolektor		47,00
c.	Penataan dan pembangunan situ, waduk dan polder	5,00	327,00
1.	Pembebasan Tanah Polder Kapuk Poglar		10,00
2.	Pembangunan Polder Kampung Bandan		23,00
3.	Pembangunan Pump Gate Kapuk Poglar		45,00

NAMA PROGRAM/KEGIATAN DEDICATED	ANGGARAN	
	2009	2010
4. Pembangunan Long Storage Kapuk Poglar		30,00
5. Peningkatan Sistem Tata Air Kawasan Kampung Bandan		6,00
6. Perbaikan tanggul Situ Arman Pedongkelan (Perbatasan Jakarta Timur - Depok)		6,00
7. Pembangunan Waduk Halim		20,00
8. Pembangunan Rumah Pompa dan Pengadaan 4 unit Pompa kapasitas 5 m3/detik di Waduk Pluit	-	100,00
9. Pekerjaan Tanah Perluasan Situ Babakan ±16 ha (mendukung PBB)	-	72,00
10. Pekerjaan Turap Situ Babakan ±16 ha (mendukung PBB)	-	15,00
3 PENANGGULANGAN POLUSI	168,12	720,00
a. Pembangunan dan pengembangan RTH	128,12	622,00
1. Peningkatan Hutan Kota di Jakarta Timur, Jakarta Pusat dan Jakarta Utara		68,00
2. Lanjutan pembebasan tanah Kebun Pisang di bawah Jln Tol Bandara/Penjaringan		300,00
3. Pembangunan Taman Interaktif 5 wilayah		25,00
4. Pembebasan dan Pengamanan Taman Borobudur		70,00
5. Pembuatan Detail Engineering Desain (DED) Stadion BMW bertaraf internasional		9,00
6. Pembangunan Stadion Utama BMW	-	150,00
b. Pembangunan green building	30,00	86,00
1. Pembangunan "Green Building" Gedung Balaikota Blok G'		86,00
c. Pengendalian Polusi Udara	10,00	12,00
1. Pembangunan 2 Stasiun Pemantauan Kualitas Udara		12,00
4 PENINGKATAN KUALITAS KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT	1.772,17	2.376,86
a. Pembangunan dan Pengembangan Rusun	435,50	300,60
1. Pematangan tanah untuk Rusun Waduk Pluit Jakarta Utara (termasuk penurapan dan pemagaran)		8,60
2. Pembangunan Rusun Waduk Pluit Jakarta Utara (8 blok)		136,00
3. Pembangunan Rusun Lainnya		120,00
4. Rehab Total Rusun Tambora Jakarta Barat (3 Tower) dengan konsep Green Building		36,00
b. Peningkatan kualitas permukiman dan perbaikan kampung	25,97	170,00
1. Penataan Kawasan Kumuh Miskin versi baru (MHT Plus)		50,00
2. Pembangunan Kabel Bawah Laut Kep.Seribu Utara		120,00
c. Peningkatan layanan pendidikan	954,49	1.404,26
1. BOP Pendidikan Dasar (SDN, SMPN, MIN, MTsN)		827,82
2. BOP Pendidikan Menengah (SMAN, SMKN, MAN)		159,94
3. Rehab Total Gedung SDN (25 SDN), Rehab Total Gedung SMPN (21 SMPN) dan Rehab Total Gedung SMAN (2 SMAN) dengan Konsep Berwawasan Lingkungan Green School	-	396,50
4. Pembangunan Gedung Baru SMPN Sukapura	-	11,00
5. Pembangunan Gedung Baru SDN Semanan	-	9,00
d. Peningkatan layanan kesehatan masyarakat	356,21	502,00
1. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM)		413,00
2. Pembangunan Puskesmas Rawat Inap (4 Kecamatan)		25,00
3. Pembangunan Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih (Rawat Inap)	-	15,00

NAMA PROGRAM/KEGIATAN DEDICATED	ANGGARAN	
	2009	2010
4. Rehab Total Puskesmas Kelurahan Warakas	-	5,00
5. Rehab Total Kelurahan Sukapura	-	5,00
6. Rehab Total Puskesmas Kelurahan Jelambar	-	5,00
7. Rehab Berat Puskesmas Kelurahan Rorotan	-	2,00
8. Pembangunan Kandang Unggas di Cakung (antisipasi flu burung)		27,00
9. Peningkatan Pengolahan Limbah RPH Babi Kapuk (antisipasi flu Babi)		5,00
5 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENINGKATAN LAYANAN LINI TERDEPAN	1.039,21	1.233,46
a. PPMK	206,25	267,00
1. PPMK	206,25	267,00
b. Peningkatan layanan lini terdepan	832,96	966,46
1. Penguatan Kelurahan	700,96	834,46
2. Penguatan Kecamatan	132,00	132,00
6 ANTISIPASI PERUBAHAN IKLIM	18,00	45,00
a. Penanggulangan air laut pasang	18,00	45,00
1. Pembangunan Tanggul Pasang Laut (Rob)		45,00
7 PENGEMBANGAN BUDAYA KERAGAMAN	0,00	187,53
a. Pembangunan dan pengembangan lingkungan cagar budaya	0,00	124,73
1. Konservasi Bangunan eks Kodim 0505 Jakarta Timur		4,00
2. Review Masterplan Kawasan PKJ-TIM		0,50
3. Penataan Kawasan PKJ-TIM		25,00
4. Penyelesaian Gedung Diklat dan OM Islamic Center		75,00
5. Perpanjangan Sewa Lahan untuk Bangunan Panggung Eksisting (mendukung PBB)		0,03
6. Pembebasan Lahan 5000 M2 (mendukung PBB)		6,20
7. Penyelesaian Jln. Pintu Kecil, Jln. Kali besar Selatan, Jln. Pancoran dan Jln. Tembus Kemukus (Kawasan Kota Tua)		5,00
8. FS Jln. Tembus Kampung Muka Timur (Kawasan Kota Tua)		1,00
9. Taman diatas TPO Stasiun Kota (Kawasan Kota Tua)		5,00
10. Rehab Gedung KNPI Provinsi di Rawamangun		3,00
b. Persiapan Pelaksanaan Sea Games dan PON	0,00	62,80
1. Rehab Gedung Balap Sepeda (Velodrom)		6,00
2. Pengadaan Peralatan Penunjang Olahraga Balap Sepeda		0,50
3. Pembangunan Fasilitas Luar Gedung Anggar (Parkir, ruang pendukung dan halaman) GR Pulo Gadung		5,00
4. Pengadaan Peralatan Pendukung Olahraga Anggar		2,50
5. Rehab Parquet Lapangan Basket GOR Jakarta Utara		2,00
6. Pembangunan GR Tanjung Priok		20,00
7. Pengadaan Peralatan Pendukung Basket, Bulu Tangkis dan Bola Volley		2,50
8. Pembinaan Atlit Sea Games 2011 (200 atlit, 43 cabang)		10,00
9. Pembinaan Atlit PON 2012		14,30
8 PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE	4,84	5,00
a. Impelementasi transparansi dan akuntabilitas	4,84	5,00
1. Implementasi Reformasi Birokrasi dan SAP		5,00

4. Kebijakan dan Rencana Pembiayaan Daerah

Dalam struktur APBD, di samping komponen pendapatan dan belanja daerah, juga mencakup pembiayaan daerah yang meliputi sumber penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan pembiayaan timbul karena jumlah pengeluaran daerah lebih besar dari penerimaan sehingga menimbulkan defisit. Sumber penerimaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dari dana cadangan, penerimaan pinjaman dan obligasi, serta hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan sumber pengeluaran daerah terdiri dari transfer ke dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.

a. Penerimaan

Untuk tahun 2010, sumber penerimaan utama pembiayaan ditetapkan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu berupa sisa penyerapan belanja tahun 2009 dan tidak menggunakan Dana Cadangan Daerah (DCD). Pada pembiayaan daerah tahun 2010 ini, diasumsikan tidak terjadi pelampauan target pendapatan 2009 dan penyerapan belanja diperkirakan sekitar 90 persen (Belanja Tidak Langsung sebesar 95 persen dan Belanja Langsung sebesar 87 persen). Dengan asumsi tersebut sisa lebih (SILPA) diperkirakan mencapai sebesar Rp. 2,22 triliun. Untuk alternatif pinjaman, obligasi, ataupun lainnya belum dilakukan pada tahun 2010 sehingga total penerimaan tahun 2010 diperkirakan sebesar Rp. 2,22 triliun.

b. Pengeluaran

Hutang pokok yang harus di bayar pada tahun 2010 adalah sebesar Rp. 24,7 miliar. Sementara penyertaan modal Pemerintah Provinsi pada tahun 2010 terdiri dari PT Kawasan Berikat Nusantara sebesar Rp. 200 miliar dan PT. MRT Jakarta sebesar Rp. 35 miliar. Total pengeluaran 2010 sebesar Rp. 259,7 miliar.

Tabel 3.6 Perkiraan Pembiayaan Daerah Tahun 2009 - 2010

JENIS PEMBIAYAAN	2009	2010
(1)	(2)	(3)
Sumber Penerimaan Daerah	1.746,0	2.220,0
▪ Sisa Lebih PATYL (SiLPA)	1.580,0	2.220,0
▪ Transfer dari DCD	150,0	0,0
▪ Penerimaan dari Obligasi Daerah		
▪ Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	16,0	0,0
Sumber Pengeluaran Daerah	281,1	259,7
▪ Penyertaan Modal Pemerintah	256,4	235,0
- PT. Bank DKI		
- PT. Kawasan Berikat Nusantara	100,0	200,0
- PT. MRT Jakarta	93,0	35,0
- PPMK LKM Bina Ekonomi	60,8	0,0
- PT Jakarta Tourisindo	2,6	0,0
▪ Pembayaran Utang Pokok	24,7	24,7
- Pembayaran Utang Pokok yg jatuh tempo	24,7	24,7
- Pembayaran Hutang Pihak ketiga		
▪ Transfer ke DCD		
PEMBIAYAAN	1.464,92	1.960,30